

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas

rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-privatepartnership*), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government* (Menkominfo, 2003).

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan SI/TI.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 65/M.KOMINFO/III/2002 tanggal 22 maret 2002 perihal koordinasi Rencana Pembangunan Teknologi Informasi, yang berisikan agar setiap instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melaporkan kondisi perkembangan sistem informasi yang ada dilingkungan masing-masing dan mengkoordinasikan setiap rencana pengembangan teknologi informasi dengan kementerian Komunikasi dan Informasi guna tercapainya sinergi, efisiensi, dan integrasi pada Sistem Teknologi Informasi di Indonesia, serta untuk menghindari duplikasi antara instansi. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS dengan surat No. 1544/M.PPN/04/2002 tanggal 18 April 2002 perihal Koordinasi Rencana

Pengembangan Teknologi Informasi Nasional, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*.

Pemerintah Daerah Purwakarta menyadari sepenuhnya peranan teknologi informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi Pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar.

Sebagaimana kita ketahui fungsi pengelola data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya, seperti halnya sumber daya manusia, keuangan, waktu dan lainnya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era milenium ini, perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam

pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Maka dirasa perlu untuk menyusun Perencanaan Strategis Sistem Informasi didalam lingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta, karena berdasarkan survey, Pemda Kabupaten Purwakarta belum optimal dalam upaya pemanfaatan TI untuk menyelesaikan berbagai masalah dilingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta, contohnya pemanfaatan SI/TI dalam pengolahan data, Pemda Kabupaten Purwakarta belum memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani masalah pengelolaan data secara otomatis dan terpusat, pemanfaatan SI/TI untuk mengintegrasikan informasi lintas SKPD, Pemda Purwakarta masih belum memiliki infrastruktur TI untuk mendukung pertukaran informasi yang terintegrasi antar SKPD, pemanfaatan SI/TI secara strategis, secara keseluruhan pemanfaatan SI/TI yang kurang, menyebabkan Pemda Kabupaten Purwakarta belum merasakan fungsi SI/TI secara strategis, seperti pengubahan cara kerja dan layanan Pemda Purwakarta untuk melayani masyarakat dan dunia bisnis jauh lebih cepat dan nyaman. Belum adanya koordinasi, serta penyimpanan data dan informasi yang sifatnya masih pulau-pulau, dimana setiap bidang mengembangkan kebutuhan sistem informasinya sendiri-sendiri, tanpa mengacu pada suatu portofolio atau rencana pemanfaatan TI yang terpadu dan menyeluruh, seluruh SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta masih menyimpan arsip maupun dokumen baik dalam bentuk elektronik dan fisik dimasing-masing satuan kerjanya, sehingga kebutuhan informasi lintas bidang tidak dapat diperoleh secara cepat, contoh dalam menentukan jumlah pemilih

Pilkada 2008, KPUD Purwakarta masih membutuhkan data dari Dinas Kependudukan Daerah dan BPS daerah dalam jangka waktu lama, bahkan kadang terdapat perbedaan. Hal inilah yang menjadi kelemahan koordinasi antar bagian dilingkungan Pemda Kabupaten Purwakarta

Maka diperlukan suatu perencanaan strategis sistem informasi atau teknologi informasi pada setiap pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Perencanaan Strategis SI/TI ini akan menjadi dasar untuk merencanakan pemanfaatan SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan untuk menentukan strategi atau bentuk pengelolaan SI/TI yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Purwakarta adalah kurang optimalnya pemanfaatan SI/TI dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan kebijakan kelembagaan terhadap implementasi SI/TI. Pertanyaan penelitian yang timbul adalah, “Bagaimana menjawab permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi SI/TI yang terencana melalui pendekatan perencanaan strategis sistem informasi yang selaras dengan implementasi *E-Government* dalam kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) ? ”.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dengan dibatasi hanya pada perangkat daerah kabupaten Purwakarta yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 Tahun 2000 tentang "Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta", yang kemudian direvisi pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2002. Adapun perangkat daerah Kabupaten Purwakarta terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah, yang membawahi tiga Asisten Sekretaris Daerah meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang administrasi.
 - b. Dinas Daerah kabupaten Purwakarta yang meliputi : Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Dinas Pertanian TP dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Dinas Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Pengairan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Badan RSUD Bayu Asih, Badan Pariwisata, Seni,

dan Budaya, Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB, Badan Koperasi dan UKM, Kantor Arsip Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pertambangan dan Energi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Dengan mempertimbangkan penerapan *E-Government* dalam kerangka Sistem Informasi Nasional diseluruh daerah, maka perlu diidentifikasi pola umum perencanaan strategis SI/TI yang didapatkan dari perbandingan dokumen perencanaan strategis SI/TI dari berbagai organisasi pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rumusan perencanaan strategis SI/TI di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mencakup penentuan target portofolio aplikasi yang harus dibangun dan penentuan strategi, serta bentuk pengelolaan SI/TI yang tepat untuk diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang dapat lebih memperkaya pengetahuan di bidang perencanaan strategis SI/TI.

2. Manfaat Praktis

Perencanaan Strategis SI/TI yang dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan menjadi referensi untuk proses penyusunan perencanaan strategis bagi pemerintah daerah lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas bab-bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan, sasaran, dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang berhubungan dengan penelitian, mencakup metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan pustaka dari beberapa perencanaan strategis yang telah ada.

BAB III PROFIL ORGANISASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai profil Organisasi Pemerintah dan profil salah satu Organisasi Pemerintah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dijadikan contoh kasus dalam pengimplementasian perancangan strategis sistem informasi dalam penelitian ini.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan dari penelitian, waktu dan tempat, serta bahan dan alat yang digunakan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisa Faktor Internal, Analisa Faktor Eksternal, terhadap organisasi, dengan menggunakan teori-teori dan metodologi seperti yang disebutkan dalam Bab II.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan evaluasi dari seluruh kegiatan dalam penelitian ini serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

